

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa kondisi penerapan dimensi *value for money* pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango sudah cukup baik atau termasuk dalam kategori sedang.
2. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa kondisi akuntabilitas publik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango sudah cukup baik atau termasuk dalam kategori sedang.
3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis disimpulkan bahwa walaupun secara bersama-sama pengaruh penerapan dimensi *value for money* yang terdiri dari dimensi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik, tapi berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara masing-masing disimpulkan bahwa dari tiga dimensi *value for money* yang diamati hanya variabel ekonomis dan variabel efisiensi yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik, sedangkan variabel dimensi efektivitas walaupun mempunyai pengaruh yang positif terhadap akuntabilitas publik namun pengaruhnya tidak signifikan.
4. Hasil analisis determinasi menunjukkan *r square* sebesar 0,394 yang berarti bahwa variabel dependen (akuntabilitas publik) mampu dijelaskan oleh

variabel independen, yaitu variabel ekonomis (X_1), efisiensi (X_2), dan efektivitas (X_3) sebesar 39,4%, sebaliknya sebesar 60,6% ($100\% - 39,4\%$) dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini seperti keadilan dan pemerataan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diajukan saran antara lain:

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango, diharapkan lebih responsif, transparan, dan akuntabel terhadap kepentingan masyarakat dalam menggunakan sumber daya publik yang dipercayakan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan aktivitas finansial pemerintahan melalui konsep *value for money*. Oleh karena itu melalui konsep *value for money* dalam transparansi pengelolaan dan pertanggungjawaban aktivitas finansial pemerintahan, diharapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango lebih mewujudkan peningkatan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi dengan dinas pemerintah pusat serta antara dinas pemerintah daerah lainnya dibidang pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango, diharapkan lebih meningkatkan akuntabilitas lembaga sektor publik melalui perbaikan kinerja pemerintah. Oleh karena itu, sangat diperlukan *value for money* yang meliputi dimensi ekonomis, efisiensi dan efektivitas serta dimensi lainnya seperti keadilan

(*equity*) dan pemerataan atau kesetaraan (*equality*), yang merupakan perluasan dari kepatuhan tujuan dan prosedur penyelenggaraan akuntabilitas publik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango.

3. Baik untuk seluruh pegawai dan terutama pegawai bagian keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango yang memiliki tanggungjawab dan wewenang dalam menggunakan dan mengelola sumber daya yang dipercayakan publik diharapkan dapat menerapkan dimensi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dalam konsep *value for money*. Hal ini tentu saja dapat meningkatkan akuntabilitas publik baik akuntabilitas vertikal maupun akuntabilitas horizontal, mengingat semakin kuatnya tuntutan akuntabilitas publik, dimana berdasarkan fenomena yang ada saat ini masyarakat tidak percaya pada kinerja entitas pemerintah.
4. Bagi penelitian selanjutnya, kiranya dapat lebih memperdalam analisis pengaruh penerapan *value for money* yang memiliki dimensi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban aktivitas finansial di bidang pelayanan kesehatan masyarakat serta dapat lebih mengembangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas publik selain dimensi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, diantaranya adalah keadilan (*equity*) dan kesetaraan (*equality*). Keadilan mengacu pada adanya kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan layanan publik berkualitas dan kesejahteraan ekonomis. Kesetaraan artinya, penggunaan uang publik hendaknya tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja, melainkan dilakukan secara merata dengan keberpihakan kepada seluruh rakyat.